

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG
DILETAKKAN SITTA JAMINAN DIATASNYA OLEH PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 43/PDT.BTH/2023/PN SKH)**

INTISARI

Oleh:

Angela Chika Rosa Pulcherrima¹ dan Taufiq El Rahman²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implikasi hukum bagi pemegang Hak Tanggungan yang akan melakukan eksekusi terhadap objek tanah yang telah diletakkan sita jaminan oleh pengadilan, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pemohon sita jaminan, dalam hal ini Terbantah I.

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara narasumber. Difokuskan dengan mengkaji bahan kepustakaan sebagai bahan penelitian utama yang didukung dengan penelitian lapangan sebagai bahan pelengkap guna menyempurnakan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif, yakni diberikan gambaran secara analitis tentang pengimplementasi ketentuan hukum dalam realita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peletakkan sita jaminan oleh pihak lainnya, dalam hal ini pemasok bahan baku usaha plastik, terhadap objek tanah yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan menimbulkan persoalan baru. Dalam situasi ini, pemegang Hak Tanggungan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan karena adanya sita jaminan. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang Hak Tanggungan adalah mengajukan gugatan bantahan untuk mengangkat dan mencabut sita jaminan tersebut. Keberadaan Pasal 1131 KUHPdata menjadi landasan hukum krusial yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur konkuren, dalam hal ini kreditur pemohon sita jaminan yang mana sita jaminan atas objek jaminan tersebut telah dicabut.

Kata Kunci: Sita Jaminan, Hak Tanggungan, Pelindungan Hukum Kreditur Konkuren

¹ Mahasiswa Program Sarjana pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE OBJECT OF MORTGAGE RIGHTS THAT
WAS PLACED A SECURITY SEIZURE ON BY THE COURT
(STUDY OF DECISION NUMBER 43/PDT.BTH/2023/PN SKH)***

ABSTRACT

By:

Angela Chika Rosa Pulcherrima¹ and Taufiq El Rahman²

This study aims to understand the legal implications for the holder of a Mortgage Right who intends to execute on land objects that have been subject to security seizure and to understand the legal protection for the creditor applying for the seizure, in this case, the First Respondent.

This research applies normative legal research supported by empirical data through interviews with resource persons. It is focused on examining literature as the primary research material, complemented by field research to enhance the study. The collected data is then analyzed descriptively and qualitatively, providing an analytical depiction of the implementation of legal provisions in reality.

The research results show that the imposition of security seizure by other parties, in this case, the supplier of raw materials for the plastic business, on land objects already burdened with Mortgage Rights creates new issues. In this situation, the holder of a Mortgage Right can not execute the Mortgage Right on the property due to the security seizure. The legal remedy that the holder of a Mortgage Right can take is to file a lawsuit to lift and revoke the security seizure. The existence of Article 1131 of the Civil Code becomes a crucial legal basis providing legal protection for concurrent creditors, in this case, the creditor applying for the seizure, whose security seizure on the guaranteed object has been lifted.

Keywords: Security Seizure, Mortgage Right, Legal Protection of Concurrent Creditors

¹ Undergraduate Student at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.